



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAN, PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN - GANTI UANG PERSEDIAN, BATAS WAKTU PENGAJUAN SPP-LS
DAN BATAS WAKTU PENYETORAN SISA UP BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan, Pengajuan SPP-GU dan batas waktu penyetoran Sisa SPP-UP dan SPP-GU bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014);
12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAN, PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN – GANTI UANG PERSEDIAN, BATAS WAKTU PENGAJUAN SPP-LS DAN BATAS WAKTU PENYETORAN SISA UP BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu selaku Koordinator Pengelola Keuangan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Unsur pendukung Bupati dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu;
7. BPKAD/DPKAD/ Bagian Keuangan adalah unsur pendukung Bupati dalam pelaksanaan fungsi penganggaran Kabupaten Mahakam Ulu;
8. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pendukung Bupati dalam pelaksanaan fungsi perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Daerah;

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
12. Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
13. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD;
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKm adalah Pejabat yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan Barang/Jasa;
15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan tugas meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Menyiaokan Surat Perintah Membayar (SPM) dan membuat laporan Keuangan SKPD;
22. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat;

23. Penerimaan Daerah adalah Uang yang Masuk ke Kas Daerah;
24. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah;
25. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih;
26. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan Nilai kekayaan bersih;
27. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personak (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesekua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
30. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setaiap periode;
31. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengaukan pembayaran;
33. Uang persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
34. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
35. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD

- yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
36. Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung pada pihak ketiga dan bendahara Pengeluaran dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
 38. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
 39. Verifikasi adalah bentuk pengawasan melalui pegujian terhadap dokumen keuangan secara administrative dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.

BAB II MEKANISME

Pasal 2

Menetapkan besaran nilai uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017 sesuai daftar terlampir dalam Peraturan Bupati ini dengan perhitungan Total Anggaran SKPD dikurangi Dana Blokir (Belanja Modal dan Belanja Tidak Langsung) dibagi 12 dan/atau Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh PA/KPA kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

Pasal 3

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran – Ganti Uang (SPP-GU) dapat diajukan minimal telah menyelesaikan SPJ-UP mencapai 75% atau lebih dari nilai total pengajuan SPP-UP dan Pengajuan SPP-GU paling lambat tanggal 05 Desember 2017.

Pasal 4

Batas waktu penyampaian Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, Untuk SPP-TU paling lambat tanggal 21 November 2017, SPP-LS bersumber dari Dana DAK paling lambat tanggal 08 Desember 2017 dan SPP-LS bersumber dari Dana APBD paling lambat tanggal 20 Desember 2017 di terima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 5

Batas waktu penyampaian SPJ-GU NIHIL adalah paling lambat tanggal 29 Desember 2017 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 6

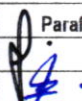
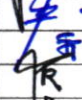




Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing bertanggungjawab sepenuhnya atas pengajuan SPP-UP dan SPP-GU sesuai nilai yang tertera dalam peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

| No | Nama | Jabatan | Paraf |
|----|-------------------------------|-----------------|---|
| 1. | Drs. Y. Juan Jenau | Wakil Bupati |  |
| 2. | Drs. Yohanes Avun, M.Si | Sekda |  |
| 3. | E. Tek Hen Yohanes, S.Pd | Ass II |  |
| 4. | Gerry Gregorius, SE. M.Si, Ak | Plt. Ka. BPKAD |  |
| 5. | Lung, SH | Kabag Hukum |  |
| 6. | Maslina Neri, SH. M.Si | Kasubag Kumdang |  |

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 2 Februari 2017



Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 3 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 02.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN, PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN - GANTI UANG PERSEDIAAN, BATAS WAKTU PENGAJUAN SPP-LS DAN BATAS WAKTU PENYETORAN SISA UP BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2017.

| NO | KODE SKPD | Nama SKPD | Total Anggaran | BTL + Belanja Modal | Belanja Langsung | Perhitungan UP | Jumlah SPP - UP dibulatkan | Keterangan |
|----|-----------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 6 : 12 | 8 | 9 |
| 1 | 1.01.1.01.01.01 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 126.562.038.010,60 | 70.207.703.010,60 | 56.354.335.000,00 | 2.348.097.291,67 | 2.348.097.000,00 | |
| 2 | 1.01.1.01.01.21 | SMP Negeri 1 Long Apari | 1.925.136.902,20 | 1.256.808.102,20 | 668.328.800,00 | 55.694.066,67 | 55.694.000,00 | |
| 3 | 1.01.1.01.01.22 | SMP Negeri 1 Long Pahangai | 1.555.346.222,40 | 1.201.346.222,40 | 354.000.000,00 | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | |
| 4 | 1.01.1.01.01.23 | SMP Negeri 1 Long Bagun | 2.512.720.305,60 | 1.791.043.805,60 | 721.676.500,00 | 60.139.708,33 | 60.139.000,00 | |
| 5 | 1.01.1.01.01.24 | SMP Negeri 1 Laham | 1.502.573.159,40 | 969.344.659,40 | 533.228.500,00 | 44.435.708,33 | 44.435.000,00 | |
| 6 | 1.01.1.01.01.25 | SMP Negeri 1 Long Hubung | 1.784.071.746,20 | 1.231.867.246,20 | 552.204.500,00 | 46.017.041,67 | 46.017.000,00 | |
| 7 | 1.01.1.01.01.35 | SMP Negeri 2 Long Pahangai | 1.115.393.170,00 | 615.296.170,00 | 500.097.000,00 | 41.674.750,00 | 41.674.000,00 | |
| 8 | 1.01.1.01.01.36 | SMP Negeri 2 Long Bagun | 1.586.290.495,80 | 979.467.495,80 | 606.823.000,00 | 50.568.583,33 | 50.568.000,00 | |
| 9 | 1.01.1.01.01.37 | SMP Negeri 2 Long Hubung | 2.052.599.091,40 | 1.555.382.091,40 | 497.217.000,00 | 41.434.750,00 | 41.434.000,00 | |
| 10 | 1.01.1.01.01.38 | SMP Negeri 2 Laham | 802.714.500,00 | 294.056.000,00 | 508.658.500,00 | 42.388.208,33 | 42.388.000,00 | |
| 11 | 1.01.1.01.01.45 | SMP Negeri 3 Long Bagun | 1.230.665.595,60 | 763.283.845,60 | 467.381.750,00 | 38.948.479,17 | 38.948.000,00 | |
| 12 | 1.01.1.01.01.46 | SMP Negeri 3 Long Hubung | 1.754.406.616,20 | 1.087.828.366,20 | 666.578.250,00 | 55.548.187,50 | 55.548.000,00 | |
| 13 | 1.01.1.01.01.55 | SMP Negeri 4 Long Hubung | 677.713.000,00 | 239.752.000,00 | 437.961.000,00 | 36.496.750,00 | 36.496.000,00 | |
| 14 | 1.01.1.01.01.56 | SMP Negeri 4 Long Bagun | 800.000.500,00 | 301.328.000,00 | 498.672.500,00 | 41.556.041,67 | 41.556.000,00 | |
| 15 | 1.01.1.01.01.65 | SMP Negeri 5 Long Bagun | 760.268.000,00 | 309.848.000,00 | 450.420.000,00 | 37.535.000,00 | 37.535.000,00 | |
| 16 | 1.02.1.02.01.01 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 123.414.414.805,20 | 64.204.942.427,20 | 59.209.472.378,00 | 2.467.061.349,08 | 2.467.061.000,00 | |
| 17 | 1.02.1.02.01.02 | Puskesmas Long Apari | 2.846.072.169,40 | 1.836.572.169,40 | 1.009.500.000,00 | 84.125.000,00 | 84.125.000,00 | |
| 18 | 1.02.1.02.01.03 | Puskesmas Long Pahangai | 4.813.845.450,40 | 2.781.775.450,40 | 2.032.070.000,00 | 169.339.166,67 | 169.339.000,00 | |
| 19 | 1.02.1.02.01.04 | Puskesmas Long Bagun | 4.976.868.657,20 | 3.731.905.535,20 | 1.244.963.122,00 | 103.746.926,83 | 103.746.000,00 | |
| 20 | 1.02.1.02.01.05 | Puskesmas Laham | 2.597.626.865,40 | 1.445.647.865,40 | 1.151.979.000,00 | 95.998.250,00 | 95.998.000,00 | |
| 21 | 1.02.1.02.01.06 | Puskesmas Long Hubung | 3.019.886.534,80 | 2.391.383.034,80 | 628.503.500,00 | 52.375.291,67 | 52.375.000,00 | |
| 22 | 1.03.1.03.01.01 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 510.661.708.019,60 | 408.547.488.019,60 | 102.114.220.000,00 | 4.254.759.166,67 | 4.254.759.000,00 | |
| 23 | 1.05.1.05.01.01 | Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 5.304.420.000,00 | 1.587.460.000,00 | 3.716.960.000,00 | 309.746.666,67 | 309.746.000,00 | |
| 24 | 1.05.1.05.02.01 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 15.963.030.291,00 | 4.232.853.291,00 | 11.730.177.000,00 | 977.514.750,00 | 977.514.000,00 | |
| 25 | 1.06.1.06.01.01 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak | 9.307.306.700,00 | 1.777.684.000,00 | 7.529.622.700,00 | 627.468.558,33 | 627.468.000,00 | |
| 26 | 2.05.2.05.01.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 5.401.868.000,00 | 2.282.888.000,00 | 3.118.980.000,00 | 259.915.000,00 | 259.915.000,00 | |
| 27 | 2.06.2.06.01.01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 10.852.601.426,40 | 4.133.662.726,40 | 6.718.938.700,00 | 559.911.558,33 | 559.911.000,00 | |
| 28 | 2.07.2.07.01.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung | 14.725.890.000,00 | 1.766.496.000,00 | 12.959.394.000,00 | 1.079.949.500,00 | 1.079.949.000,00 | |
| 29 | 2.09.2.09.01.01 | Dinas Perhubungan | 29.243.665.341,60 | 9.307.848.341,60 | 19.935.817.000,00 | 1.661.318.083,33 | 1.661.318.000,00 | |
| 30 | 2.10.2.10.01.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian | 8.555.259.000,00 | 4.867.363.000,00 | 3.687.896.000,00 | 307.324.666,67 | 307.324.000,00 | |
| 31 | 2.12.2.12.01.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu | 4.867.131.000,00 | 1.766.496.000,00 | 3.100.635.000,00 | 258.386.250,00 | 258.386.000,00 | |
| 32 | 3.02.3.02.01.01 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 5.302.291.000,00 | 2.439.976.000,00 | 2.862.315.000,00 | 238.526.250,00 | 238.526.000,00 | |
| 33 | 3.03.3.03.01.01 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 29.940.209.221,40 | 8.313.523.221,40 | 21.626.686.000,00 | 1.802.223.833,33 | 1.802.223.000,00 | |
| 34 | 4.01.4.01.03.01 | Bagian Pemerintahan | 9.923.860.000,00 | 995.000.000,00 | 8.928.860.000,00 | 744.071.666,67 | 744.071.000,00 | |
| 35 | 4.01.4.01.03.02 | Bagian Hukum | 5.005.995.000,00 | - | 5.005.995.000,00 | 417.166.250,00 | 417.166.000,00 | |
| 36 | 4.01.4.01.03.03 | Bagian Ekonomi | 4.128.653.000,00 | - | 4.128.653.000,00 | 344.054.416,67 | 344.054.000,00 | |
| 37 | 4.01.4.01.03.04 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 12.570.966.000,00 | 12.000.000,00 | 12.558.966.000,00 | 1.046.580.500,00 | 1.046.580.000,00 | |
| 38 | 4.01.4.01.03.05 | Bagian Umum | 87.757.354.122,40 | 38.793.880.122,40 | 48.963.474.000,00 | 4.080.289.500,00 | 4.080.289.000,00 | |
| 39 | 4.01.4.01.03.06 | Bagian Humas dan Protokol | 10.242.735.000,00 | 55.000.000,00 | 10.187.735.000,00 | 848.977.916,67 | 848.977.000,00 | |

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN, PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN - GANTI UANG PERSEDIAAN, BATAS WAKTU PENGAJUAN SPP-LS DAN BATAS WAKTU PENYETORAN SISA UP BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2017.

| NO | KODE SKPD | Nama SKPD | Total Anggaran | BTL + Belanja Modal | Belanja Langsung | Perhitungan UP | Jumlah SPP - UP dibulatkan | Keterangan |
|----|-----------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 6 : 12 | 8 | 9 |
| 40 | 4.01.4.01.03.07 | Bagian Pembangunan | 734.560.000,00 | - | 734.560.000,00 | 61.213.333,33 | 61.213.000,00 | |
| 41 | 4.01.4.01.03.08 | Bagian Organisasi dan Tatalaksana | 401.221.000,00 | - | 401.221.000,00 | 33.435.083,33 | 33.435.000,00 | |
| 42 | 4.01.4.01.03.09 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 8.640.892.000,00 | - | 8.640.892.000,00 | 720.074.333,33 | 720.074.000,00 | |
| 43 | 4.01.4.01.08.01 | Kantor Pengelola Perbatasan | 9.344.491.740,00 | 4.695.287.490,00 | 4.649.204.250,00 | 387.433.687,50 | 387.433.000,00 | |
| 44 | 4.01.4.01.09.01 | Sekretariat DPRD | 39.033.151.700,60 | 5.664.019.700,60 | 33.369.132.000,00 | 2.780.761.000,00 | 2.780.761.000,00 | |
| 45 | 4.01.4.01.51.01 | Kecamatan Long Apari | 9.444.915.967,34 | 6.828.075.967,34 | 2.616.840.000,00 | 218.070.000,00 | 218.070.000,00 | |
| 46 | 4.01.4.01.52.01 | Kecamatan Long Pahangai | 12.245.545.669,82 | 9.459.020.669,82 | 2.786.525.000,00 | 232.210.416,67 | 232.210.000,00 | |
| 47 | 4.01.4.01.53.01 | Kecamatan Long Bagun | 10.396.177.532,96 | 7.991.862.532,96 | 2.404.315.000,00 | 200.359.583,33 | 200.359.000,00 | |
| 48 | 4.01.4.01.54.01 | Kecamatan Laham | 8.222.924.263,72 | 5.810.336.263,72 | 2.412.588.000,00 | 201.049.000,00 | 201.049.000,00 | |
| 49 | 4.01.4.01.55.01 | Kecamatan Long Hubung | 12.172.170.091,78 | 8.403.230.091,78 | 3.768.940.000,00 | 314.078.333,33 | 314.078.000,00 | |
| 50 | 4.02.4.02.01.01 | Inspektorat | 18.239.193.649,60 | 8.115.872.649,60 | 10.123.321.000,00 | 843.610.083,33 | 843.610.000,00 | |
| 51 | 4.03.4.03.01.01 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 53.693.690.146,20 | 5.316.710.646,20 | 48.376.979.500,00 | 2.015.707.479,17 | 2.015.707.000,00 | |
| 52 | 4.04.4.04.05.01 | Badan Pendapatan Daerah | 18.307.248.617,40 | 5.262.383.697,40 | 13.044.864.920,00 | 1.087.072.076,67 | 1.087.072.000,00 | |
| 53 | 4.04.4.04.06.01 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 34.438.255.320,00 | 21.761.808.000,00 | 12.676.447.320,00 | 1.056.370.610,00 | 1.056.370.000,00 | |
| 54 | 4.05.4.05.01.01 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 16.538.836.200,00 | 1.772.496.000,00 | 14.766.340.200,00 | 1.230.528.350,00 | 1.230.528.000,00 | |

| No | Nama | Jabatan | Paraf |
|----|------------------------------|-----------------|-------|
| 1. | Drs. Y. Juan Jenau | Wakil Bupati | |
| 2. | Drs. Yohanes Avun, M.Si | Sekda | |
| 3. | E. Tek Hen Yohanes, S.Pd | Ass II | |
| 4. | Gerry Gregorius SE, M.Si, Ak | Plt. Ka. BPKAD | |
| 5. | Lung, SH | Kabag Hukum | |
| 6. | Maslina Neri, SH, M.Si | Kasubag Kumdang | |



Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 3 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 02